

Khawatirkan Aset Miliaran Rupiah Lenyap

SUNGAI RAYA—DPRD Kubu Raya mengkhawatirkan pengelolaan aset daerah bergerak dan tidak bergerak yang sampai sekarang belum ada kejelasan. Para wakil rakyat ini ramai-ramai mendesak sesegera mungkin dibuatkan payung hukum untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

Dengan demikian akan terjadi pengelolaan secara transparan. “Yang kita takutkan adalah adanya klaim ataupun pengakuan pihak tertentu. Jangan dibiarkan lama-lama. Sebab, aset-aset tersebut milik negara yaitu Pemkab. Sesegera mungkin harus ada payung hukumnya berupa perda atau

perbup,” ujar Norali didampingi Muhaini A Muin, kemarin.

Menurut dia kabupaten muda di Kalbar dikhawatirkan muncul aset tidak bergerak peninggalan Kabupaten Pontianak. Miliaran rupiah aset tersebut sampai sekarang belum terdata dan diinventarisir secara signifi-

kan. “Baru kami ketahui adalah aset PDAM. Sementara aset lain belum ada. Tanah, bangunan sekolah dan bangunan lain. Berdasarkan audit BPK RI tahun 2010 sudah jelas opini yang dikeluarkan untuk pengelolaan aset di Kubu Raya disclaimer,” ujarnya.

Ia menambahkan yang dikhawatirkan dari aset milik Pemkab adalah terjadinya pengklaiman atau pengakuan ahli waris. Sebab, Pemkab tidak memiliki bukti adanya serah terima atau hibah. “Contohnya

adalah bangunan sekolah di Teluk Pakedai yang diklaim ahli waris. Begitu juga bangunan pasar di Parit Baru dan Kuala Dua. Mungkin kedepannya masih banyak lagi persoalan lain muncul akibat aset ini. Jadi kita harapkan Pemkab tidak meremehkan persoalan ini,” ujar dia.

Beberapa waktu lalu, Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan menerangkan pihaknya telah memastikan membentuk tim menginventarisir sejumlah aset daerah. “Pemkab akan terus melakukan penataan dan pemantapan manajemen aset. Penilaian aset dilakukan oleh Panitia Penilai Barang Inventaris bekerja sama dengan BPKP Kalbar dan kantor PBB Pontianak,” ujarnya.

Bupati menyampaikan di tahun 2010 anggaran belanja aset sebesar Rp9,77 miliar. Namun yang teralisasi 13,87 persen atau sebesar Rp1,35 miliar. “Sementara jumlah aset Kubu Raya sebesar Rp530,51 miliar tanpa kewajiban baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang,” jelas Bupati Muda.

Kepala DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan, Aset Daerah) Kubu Raya, Sutrisno beberapa waktu lalu telah mengungkapkan Pemkab sekarang ini sedang menggodok draft perda retribusi aset daerah terutama

dari sektor alat berat. “Perda merupakan payung hukum yang lebih dominan dan tinggi. Oleh karena itu dirasakan penting membuat aturan penarikan retribusi alat berat,” ujarnya.

Ia menambahkan sebenarnya solusi lain persoalan aset adalah melalui sumbangan pihak ketiga. Hanya saja tidak akan kuat jika tidak ada payung hukum. Kedepan dengan perda tersebut akan diatur pengelompokan jenis alat berat dimaksud. Dan tinggal instansi teknis yang meramu.

“Memang sejak tahun 2010 tidak ada penarikan retribusi alat berat ataupun sumber-sumber penerimaan lain. Provinsi tidak mungkin melakukan penarikan karena itu merupakan aset daerah kabupaten,” ucap dia.

Untuk saat ini, ujarnya, Pemkab Kubu Raya memiliki dua unit alat berat berupa ekskavator sebagai aset daerah. Kedepannya direncanakan tahun 2012 menambah lagi dua unit alat berat. Alat berat tersebut nangkring dan dikelola instansi teknis seperti Dinas Bina Marga dan Pengairan. Sedangkan aset tidak bergerak tersebar di sembilan kecamatan seperti bangunan sekolah, perkantoran atau tanah. “Dan kami akan perjuangkan aset terus signifikan menjadi milik Pemkab,” terangnya. (*den*)



Foto deny/Pontianak Post

JALAN: Dulu daerah di kamp PT. FSL, Kecamatan Kubu ini adalah hutan. Kini warga pedalaman sudah dapat memanfaatkannya sebagai bentuk CRS perusahaan. Jalan-jalan seperti ini umumnya banyak dibangun perusahaan untuk menjadi penghubung satu desa ke desa lainnya.